



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

LAPORAN KINERJA

Triwulan

03

20
25



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan III Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi disusun untuk melaporkan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Periode Triwulan III Tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2025.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan kinerja di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih ditingkatkan, baik pelaksanaan tugas dan fungsi maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami terus berupaya menyempurnakan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyajian Laporan Kinerja di masa mendatang.

Trenggalek, 14 Oktober 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Prigi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ririn Sugihariyati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan	3
1.3. Tugas dan Fungsi	4
1.4. Aspek Strategis	6
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. Rencana Strategis 2025 – 2029	8
2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi ..	10
2.3. Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.....	11
2.4. Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
BAB IV. PENUTUP	43
4.1. Kesimpulan	43
4.2. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	44
4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut	44

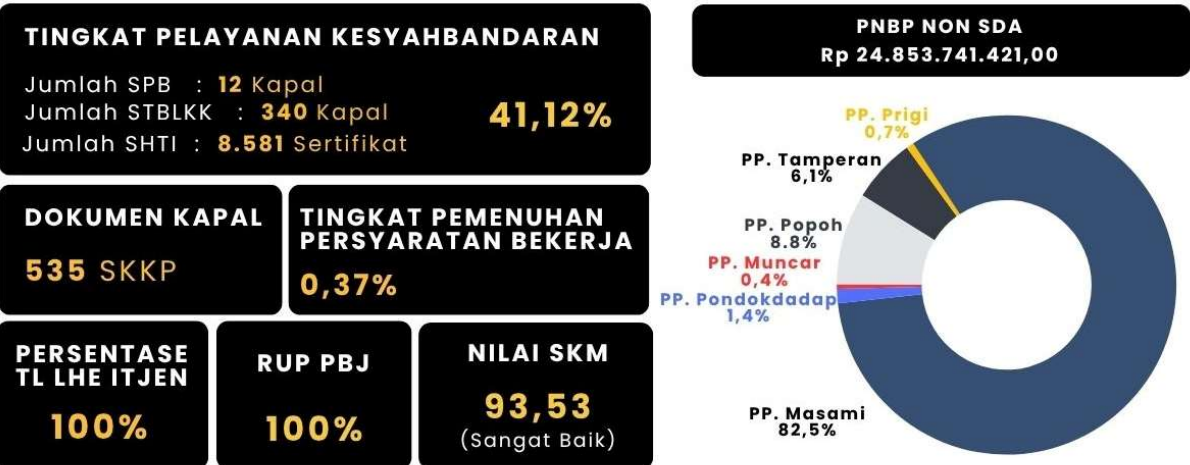
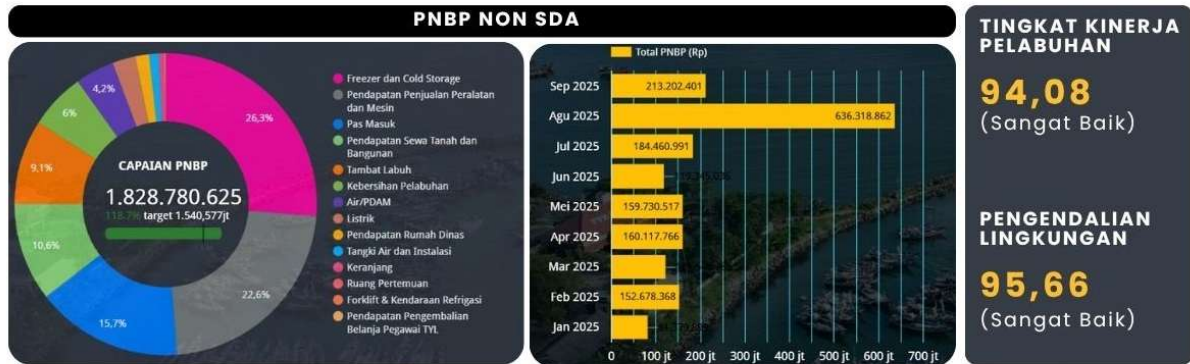
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Tahun 2025	12
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi TW III 2025 ...	16
Tabel 3. Capaian IK "Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan III 2025	18
Tabel 4. Realisasi Penerimaan PNBP Non-SDA Tahun 2025.....	18
Tabel 5. Capaian IK "Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan II 2025.....	23
Tabel 6. Volume Produksi per Alat Tangkap Triwulan III 2025.....	23
Tabel 7. Capaian IK "Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan III 2025	28
Tabel 8. Rekapitulasi Nilai Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2025	29
Tabel 9. Capaian IK "Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan III 2025	33
Tabel 10. Capaian IK "Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan" Triwulan III 2025.....	36
Tabel 11. Rekapitulasi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	37
Tabel 12. Capaian IK "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan III 2025.....	41
Tabel 13. Capaian IK "Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan III 2025	44
Tabel 14. Hasil Penghitungan Persentase Rencana Umum Pengadaan Terumumkan di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan III 2025.....	45
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan III 2025	49
Tabel 16. Realisasi Anggaran berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Utama Triwulan III 2025	54
Tabel 17. Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan Triwulan III 2025	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	6
Gambar 2. Dashboard Kinerja Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi ...	15
Gambar 3. Realisasi PNBP Non-SDA per Jenis Jasa Triwulan III 2025	19
Gambar 4. Realisasi Penerimaan PNBP Non-SDA per Bulan Triwulan II 2025	20
Gambar 5. Perbandingan Capaian PNBP Triwulan III 2020 – 2025	20
Gambar 6. Volume Produksi Perikanan Tangkap per Bulan Triwulan III 2025	24
Gambar 7. Perbandingan Capaian Volume Produksi Triwulan III Tahun 2020 - 2025	25
Gambar 8. Perbandingan Capaian Tingkat Kinerja Triwulan III 2020 – 2025	30
Gambar 10. Perbandingan Nilai SKM Triwulan III Tahun 2020 – 2025	51

RINGKASAN EKSEKUTIF



PRESTASI

- Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025 dengan Predikat "TERBAIK"
- Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan dengan Kategori Sangat Baik Bulan Juli 2025;
- Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan dengan Kategori Sangat Baik Bulan Agustus 2025;
- Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan dengan Kategori Sangat Baik Bulan September 2025.



Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu. Pelaporan kinerja ini mendukung sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas, dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggung jawab. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan III 2025 memuat capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sesuai dengan visi, misi, dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2025 – 2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 11.039.056.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 2025 sebesar Rp 8.822.032.556,00 atau mencapai 79,92%.

Secara kinerja, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,88% (Istimewa). Hal ini didukung oleh pencapaian indikator kinerja (IK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, dimana pada triwulan III 2025 (berdasarkan Perjanjian Kinerja) terdapat 8 (delapan) IK dengan capaian $\geq 100\%$. Sedangkan 7 (tujuh) IK lainnya pengukurannya bersifat tahunan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2025	TW III	TW III	%
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1 Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.540,58	1.216,01	1.831,52	150,62
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	17.054	9.237	10.616,51	114,93
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3 Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100			
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84	84	97,75	116,37
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	46			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Capaian	
				2025	TW III	TW III	%
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70			
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	30,10	30,10	94,37	313,52
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	502	494	535	108,30
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26			
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	75,5			
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja (Persen)	85	85	100	117,65
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	88			
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	87			
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	76	76	100	131,57
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	81			
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	92			
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	71,5			
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	88,50	88,50	92,87	104,94

Bab 01

Pendahuluan



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja. Sistem Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk memperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pemenuhan kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Program pengelolaan perikanan dan kelautan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025 yang pertanggungjawabannya harus dilakukan secara akuntabel dan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulanan dan tahunan). Pengukuran dan



pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan salah satu dari 22 (dua puluh dua) Pelabuhan Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap, pada tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi melaksanakan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

- Pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan
- Pengelolaan Sumber Daya Ikan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari



pelaporan kinerja ini yakni: (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang disusun secara periodik (setiap Triwulan dan Tahun).

Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2025 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tahun 2025 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) bisa diwujudkan.

1.2. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusaha guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal



perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang Pelabuhan Perikanan;
- b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan *logbook* penangkapan ikan;
- e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisaata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan dan pemasaran serta distribusi hasil perikanan;
- j. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan; dan
- o. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Adapun susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51/KEPMEN-KP/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN-KP/2020 tentang Peta Jabatan dan Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

1.4. Aspek Strategis

Aspek Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam mendukung kebijakan pembangunan perikanan tangkap Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan renstra DJPT adalah sebagai berikut:

- Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan;
- Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, menyajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan



informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai visi, misi, dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, dan targetnya) dalam Rencana Jangka Menengah (RPJM/Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan Penetapan Kinerja (PK) pada periode triwulan tertentu.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran / tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

Bab IV Penutup, pada bagian ini diuraikan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi, tindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya, serta rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran, pada bagian ini dilampirkan dokumen perjanjian kinerja, penghargaan yang diperoleh, serta dokumen kinerja lainnya.



02

Bab

Perencanaan Kinerja

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2025 – 2029

Indonesia, sebagai salah satu negara maritim terbesar dunia, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. Hal tersebut merupakan modal dasar yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju, berdaulat, adil, dan makmur serta sebagai sebuah bangsa yang tangguh dalam hal politik, keamanan sosial, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2029.

Kegiatan pembangunan subsektor perikanan tangkap di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan dan sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta mendukung pencapaian delapan misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dengan fokus pada misi Asta Cita ke-2: Swasembada pangan dan ekonomi biru.

Pencapaian Indonesia Emas 2045 merupakan sebuah keniscayaan apabila menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai episentrum pembangunan nasional, mengingat potensi sumber daya perairan yang sangat besar. Orientasi pembangunan sudah semestinya beralih ke sektor kelautan dan perikanan dengan menjadikan sektor ini sebagai poros penggerak pembangunan dan perekonomian nasional, transformasi pendekatan pembangunan yang sebelumnya hanya berorientasi pada peningkatan produksi menjadi pendekatan pembangunan secara terukur dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta berorientasi pada permintaan pasar yang menempatkan ekologi sebagai panglima. Transformasi pendekatan diimplementasikan ke dalam lima arah



kebijakan pembangunan Ekonomi Biru yaitu: 1) Memperluas kawasan konservasi laut; 2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; 3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; 4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah “Terwujudnya Tata Kelola Perikanan Tangkap yang Partisipatif, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Nelayan” untuk mewujudkan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan kedalam misi, strategi, dan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melaksanakan misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan fokus misi Asta Cita ke-2: Swasembada pangan dan ekonomi biru.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:

- Menjamin kelestarian sumber daya ikan melalui penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan pengawasan berbasis wilayah pengelolaan;
- Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan ikan melalui pemanfaatan teknologi, modernisasi armada, dan integrasi sistem logistik hasil tangkapan;
- Mengembangkan infrastruktur pelabuhan perikanan sebagai simpul layanan terpadu dan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan;
- Memperkuat kelembagaan, perlindungan, dan pemberdayaan nelayan, termasuk nelayan kecil, perempuan, dan pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing;
- Meningkatkan tata kelola perikanan tangkap yang transparan dan akuntabel, melalui penguatan regulasi, perizinan, pemantauan, serta sistem data dan informasi perikanan.

2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi menerapkan strategi dengan menetapkan Sasaran Kegiatan yang dapat digunakan sebagai acuan selama lima tahun sebagai suatu *outcome/impact* dari program kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan bagian dari Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam operasional organisasi, dengan pengukuran dan penilaian kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 **“Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan” dengan Indikator Kinerja: Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
2. Sasaran Kegiatan 2 **“Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Meningkat”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja: Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
3. Sasaran Kegiatan 3 **“Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Tangkap “Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 - b. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 - c. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;

- 
- d. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 - 4. Sasaran Kegiatan 4 **“Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 “Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan;
 - b. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan;
 - 5. Sasaran Kegiatan 5 **“Terwujudnya Layanan Dukungan Manjerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 “Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 - c. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 - d. Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 - e. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 - f. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 - g. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 - h. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; dan
 - i. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

2.3. Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator kinerja merupakan nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai

alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan.

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Tujuan umum Perjanjian Kinerja adalah 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 4) Sebagai dasar pemberian penghargaan dan atau sanksi (*reward and punishment*). Penetapan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

2.4. Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian pencapaian tujuan / sasaran atau indikasi atau ciri-ciri bahwa kinerja tercapai. Target adalah target kinerja atas indikator, sedangkan program/kegiatan adalah cara untuk mencapai target kinerja.

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran dengan dilengkapi indikator kinerja yang akan dicapai. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kegiatan kinerja spesifik yang akan dicapai meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1	Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.540,58
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	17.054
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	46
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	30,10
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	502
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	76
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	88,50

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran dengan dilengkapi indikator kinerja yang akan dicapai. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kegiatan kinerja spesifik yang akan dicapai meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun

kegiatan pendukung tersebut terdapat pada dokumen Rencana Aksi sebagaimana terdapat pada **Lampiran 2**.



Bab⁰³

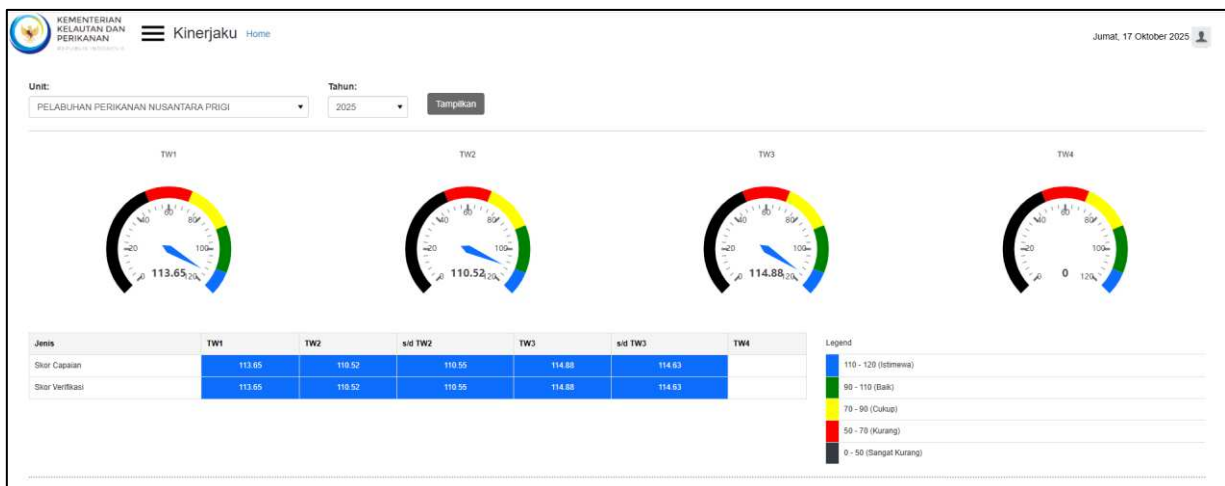
Akuntabilitas Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi unit kerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi harus dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya, baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Hal tersebut sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung jawab dimana instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertahankan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kegiatan pembangunan perikanan tangkap tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi menitikberatkan pada 5 (lima) Sasaran Kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



Gambar 2. Dashboard Kinerjaku Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi triwulan III tahun 2025 memiliki kategori "**ISTIMEWA**", ditandai dengan Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **114,88%**. Capaian ini merupakan gambaran nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada triwulan III tahun 2025, seluruh indikator kinerja atau sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja dengan pengukuran capaian bersifat triwulan tercapai ($\geq 100\%$). Sedangkan 10 (sepuluh) indikator kinerja lainnya bersifat semester dan tahun. Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi TW III 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2025	TW III	TW III	%
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1 Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.540,58	1.216,01	1.831,52	150,62
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	17.054	9.237	10.616,51	100,04
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3 Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100			
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84	84	97,75	116,37
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	46			
		6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70			
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	30,10	30,10	94,37	313,52
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	502	494	535	108,30
		9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26			
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	75,5			
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja (Persen)	85	85	100	117,65
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	88			
		13 Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	87			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Capaian	
				2025	TW III	TW III	%
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	76	76	100	131,57
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	81			
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	92			
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	71,5			
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	88,50	88,50	92,87	104,94

3.2. Analisa Capaian Kinerja

Pada periode tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Kegiatan (SK) 1 – Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator Kinerja (IK) pada SK 1 yaitu Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Indikator Kinerja (IK) 1 – Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi/badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan/pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara di sektor kelautan dan perikanan. PNBP PPN Prigi terdiri atas penerimaan umum dan fungsional.

Penghitungan nilai PNBP sektor perikanan tangkap di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan periode penilaian tahunan.

Tabel 3. Capaian IK "Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan III 2025

SK 1		Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi							
IK 1		Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra	
TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	TW III Tahun 2024	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra	% terhadap Target Renstra
478	670,51	1.183	1.397,05	1.570,19	1.216,01	1.831,52	150,62%	1.540,58	118,89%

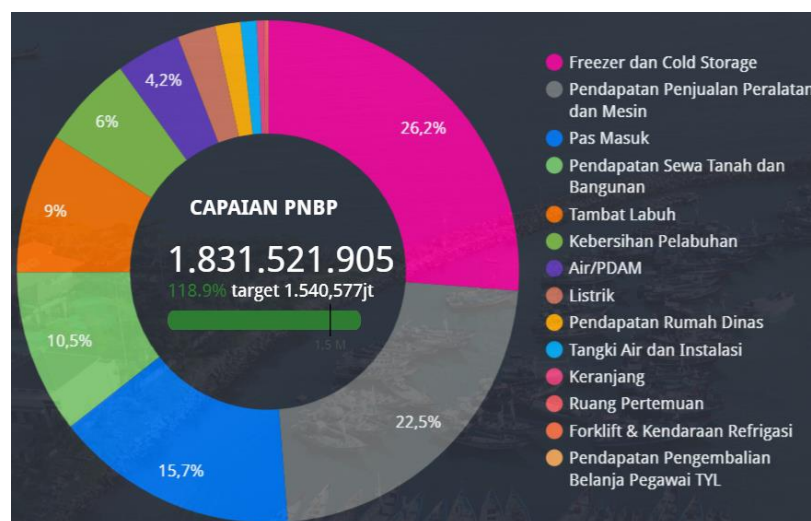
Pada triwulan III tahun 2025, capaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” sebesar Rp 1.831,52 juta atau sebesar 150,62% dari target triwulan III tahun 2025. Penerimaan PNBP Non-SDA terdiri dari PNBP Fungsional dan PNBP Umum. PNBP fungsional terdiri atas pendapatan penggunaan sarana prasarana sesuai TUSI dan pendapatan jasa pelabuhan perikanan. Sedangkan, PNBP umum terdiri atas pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, pendapatan pengembalian belanja pegawai, pendapatan penerimaan kembali belanja barang, serta pendapatan jasa lainnya. Penerimaan PNBP per jenis jasa dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4. Realisasi Penerimaan PNBP Non-SDA Tahun 2025

ANGGARAN	JENIS JASA	TARGET 2025 (Rp)	REALISASI S.D. TW III 2025 (Rp)
PNBP FUNGSIONAL			
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai TUSI	635.166.000	320.628.399
	Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan	208.438.000	3.000.000
	Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin	426.728.000	507.770.658
	Pelayanan Penggunaan Transportasi	-	1.375.000
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	867.844.000	403.616.395
	Pelayanan Tambat untuk Kapal Perikanan	185.496.000	73.649.425
	Pelayanan Labuh untuk Kapal Perikanan	136.612.000	91.958.155
	Pelayanan Jasa Pengadaan Air / PDAM	71.520.000	76.489.800
	Pelayanan Bengkel	-	-
	Pelayanan Jasa Pas Masuk Harian Sekali Masuk	254.506.000	230.538.000
	Pelayanan Jasa Pas Masuk Berlangganan	47.430.000	230.538.000
	Pelayanan Jasa Kebersihan Pelabuhan	121.773.000	109.744.840
	Pelayanan Pelabuhan (Batang Tubuh) (Pemakaian Listrik)	50.507.000	44.991.572

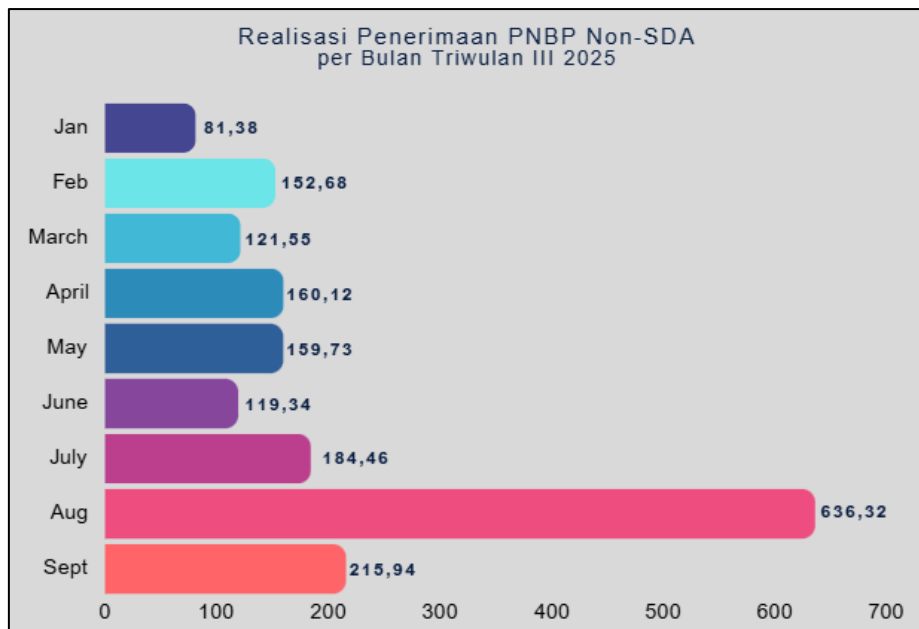
ANGGARAN	JENIS JASA	TARGET 2025 (Rp)	REALISASI S.D. TW III 2025 (Rp)
PNBP UMUM			
425122	Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin	-	412.582.202
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	40.412.033	193.096.562
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-
425911	Pendapatan Pengembalian Belanja Pegawai YTL		341.000
425912	Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang YTL	-	-
JUMLAH PNBP FUNGSIONAL DAN UMUM		1.540.577.000	1.831.521.905
TARGET PNBP TW III 2025			1.216.010.440
% CAPAIAN PNBP TW III 2025			150,62%

Persentase realisasi PNBP Non-SDA per Jenis Jasa di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



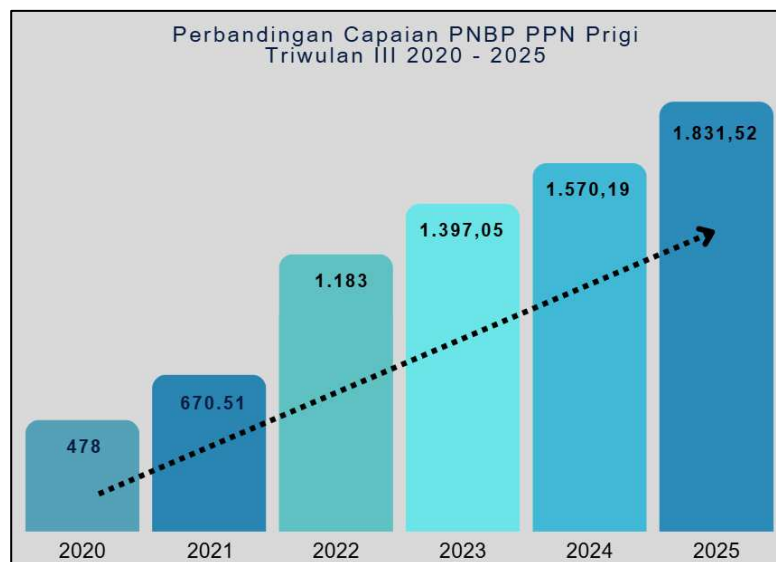
Gambar 3. Realisasi PNBP Non-SDA per Jenis Jasa Triwulan III 2025

Realisasi PNBP Non-SDA terbesar pada pelayanan penggunaan peralatan dan mesin (*freezer* dan *cold storage*) sebesar Rp 507,77 juta (27,72% dari total PNBP tahun 2025). Tingginya PNBP Non-SDA pada pelayanan penggunaan *freezer* dan *cold storage* pada Triwulan II 2025 didukung oleh adanya pembekuan produk samping ikan patin (*belly*, kulit, dan kepala) secara kontinu / tidak bergantung pada musim. Selain itu, pelayanan petugas operator ruang pendingin yang melaksanakan pelayanan setiap saat menyesuaikan dengan permintaan pengguna jasa.



Gambar 4. Realisasi Penerimaan PNBPN Non-SDA per Bulan Triwulan II 2025

Penerimaan PNBPN Non-SDA tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2025, dimana pada bulan Agustus terdapat penambahan PNBPN umum pada pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin.



Gambar 5. Perbandingan Capaian PNBPN Triwulan III 2020 – 2025

Berdasarkan grafik *Perbandingan Capaian PNBPN PPN Prigi Triwulan III Tahun 2020–2025*, terlihat adanya tren peningkatan signifikan dalam penerimaan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, capaian PNBPN tercatat sebesar 478 juta rupiah dan meningkat menjadi 670,51 juta rupiah pada tahun 2021. Kenaikan yang lebih tajam terjadi sejak tahun 2022, dengan capaian mencapai 1.183 juta rupiah, kemudian meningkat konsisten hingga



mencapai 1.831,52 juta rupiah pada tahun 2025. Peningkatan yang terjadi pasca tahun 2021 dapat dikaitkan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mulai efektif pada 18 September 2021. Regulasi tersebut menyesuaikan tarif PNBP di sektor perikanan, termasuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, dengan mempertimbangkan nilai ekonomi sumber daya ikan dan peningkatan pelayanan publik. Dampaknya terlihat jelas melalui lonjakan capaian PNBP pada tahun-tahun berikutnya, menunjukkan efektivitas kebijakan dalam mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor perikanan tangkap secara berkelanjutan.

Dibandingkan dengan target Renstra, capaian penerimaan PNBP triwulan III 2025 mencapai sebesar 118,89%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebesar 87,02%. Hal ini disebabkan tingginya penerimaan PNBP PPN Palabuhanratu pada pemanfaatan lahan, gedung, dan bangunan dan penerimaan jasa tambat kapal perikanan. Dibandingkan dari segi jumlah kontrak, PPN Palabuhanratu 263,16% lebih banyak. Selain itu, beberapa kontrak memiliki jangka waktu lima tahun dan habis kontrak pada tahun 2025.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Penerimaan PNBP Non-SDA antara lain:

- Komitmen para petugas pelayanan jasa;
- Adanya penerimaan PNBP Umum bersumber dari Penjualan Peralatan dan Mesin di bulan Agustus sebesar Rp 408,34 Juta;
- Adanya peningkatan Pendapatan Pemanfaatan Tanah Bangunan sebesar Rp 81,58 juta atau 127,04%;
- Peningkatan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa untuk memenuhi kewajiban pembayaran PNBP.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian Indikator Kinerja Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yaitu adanya penurunan pada beberapa jenis jasa, antara lain:

- Pendapatan *Cold Storage* TW III 2025 menurun sebanyak Rp 55,4 juta atau sebesar 23,45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pengguna memiliki *cold storage* sendiri;
- Pendapatan Tambat Labuh menurun sebanyak Rp 12,82 juta atau sebesar 14,20%. Hal ini disebabkan meningkatnya kapal yang *docking* (perbaikan kapal dan alat tangkap).

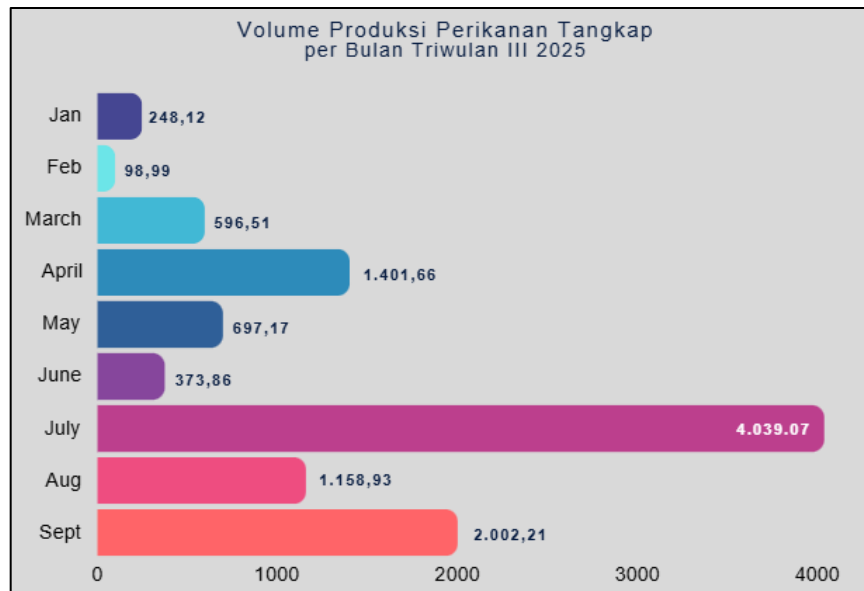
Menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian PNBTP triwulan III, maka upaya yang akan dilakukan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi kepada petugas pelayanan jasa untuk meningkatkan pelayanan *cold storage* serta melakukan koordinasi dengan petugas kesyahbandaran terkait kegiatan tambat labuh kapal. Sedangkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan III 2025 yaitu monitoring dan evaluasi pengguna jasa dan rekonsiliasi data tambat labuh.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Anggaran untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini sebesar Rp 142.664.000,00. Sampai dengan triwulan II, telah dilakukan penyerapan anggaran sebesar Rp 112.894.192,00 atau 79,13%. Sedangkan efisiensi anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 13 (tiga belas) orang SDM dengan 8 (delapan) jenis pelayanan jasa yang diberikan.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu pelabuhan perikanan UPT pusat dan perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar melalui kegiatan peningkatan pelayanan di pelabuhan perikanan dalam rangka pasca produksi dan PIT serta pelayanan perusahaan pelabuhan perikanan.

3.2.2. Sasaran Kegiatan (SK) 2 – Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Meningkat

Indikator Kinerja (IK) pada SK 2 yaitu Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.



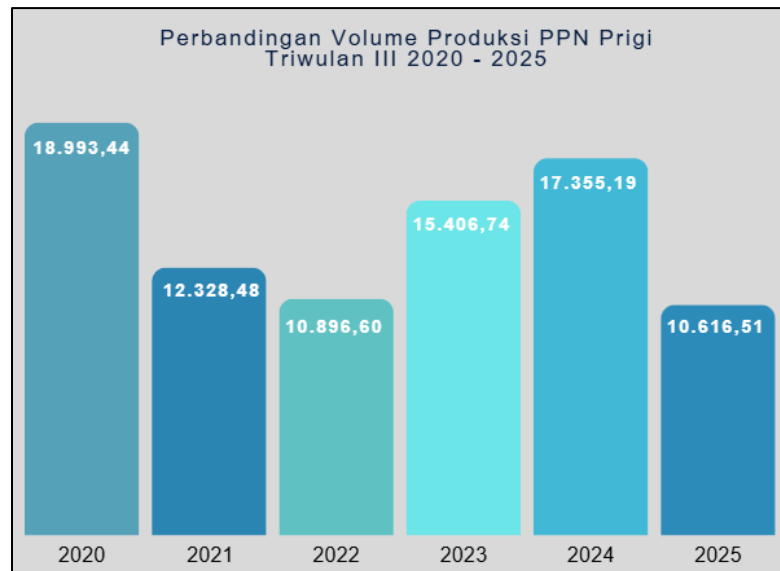
Gambar 6. Volume Produksi Perikanan Tangkap per Bulan Triwulan III 2025

Berdasarkan grafik *Volume Produksi Perikanan Tangkap per Bulan Triwulan III Tahun 2025*, terlihat bahwa aktivitas penangkapan ikan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan sepanjang tahun. Produksi pada awal tahun relatif rendah, dengan volume hanya sebesar 248,12 ton pada Januari dan bahkan turun menjadi 98,99 ton pada Februari. Kondisi ini berkaitan dengan musim barat (Desember–Maret) yang ditandai oleh gelombang tinggi, curah hujan lebat, dan angin kencang akibat dominasi angin monsun barat laut. Kondisi oseanografis tersebut menyebabkan penurunan intensitas melaut karena risiko keselamatan yang tinggi dan keterbatasan operasi kapal penangkap ikan.

Memasuki bulan April hingga Juni, produksi mulai meningkat dengan capaian tertinggi di April sebesar 1.401,66 ton. Hal ini menandai peralihan menuju musim timur, di mana cuaca mulai stabil, kecepatan angin menurun, dan suhu permukaan laut (SPL) lebih rendah yang umumnya meningkatkan produktivitas perairan karena naiknya nutrisi ke lapisan permukaan (fenomena *upwelling*). Puncak produksi terjadi pada Juli 2025 dengan volume mencapai 4.039,07 ton, sejalan dengan puncak musim timur (Juni–September) yang dikenal sebagai periode paling produktif dalam perikanan tangkap di wilayah selatan Jawa, termasuk Prigi, akibat tingginya kandungan klorofil-a dan ketersediaan ikan pelagis seperti tongkol, cakalang, dan tuna.

Setelah Juli, produksi menurun secara bertahap menjadi 1.158,93 ton pada Agustus dan 2.002,21 ton pada September, yang dapat disebabkan oleh mulai

berubahnya pola angin dan gelombang menjelang peralihan ke musim peralihan II. Secara keseluruhan, pola produksi ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara dinamika oseanografis, musim monsun, dan produktivitas perikanan tangkap, di mana stabilitas kondisi laut dan fenomena *upwelling* menjadi faktor utama penentu keberhasilan tangkapan ikan di perairan selatan Jawa.



Gambar 7. Perbandingan Capaian Volume Produksi Triwulan III Tahun 2020 - 2025

Berdasarkan grafik *Perbandingan Volume Produksi PPN Prigi Triwulan III Tahun 2020–2025*, terlihat adanya fluktuasi yang cukup mencolok dalam volume produksi perikanan tangkap selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2020, produksi mencapai titik tertinggi sebesar 18.993,44 ton, kemudian mengalami penurunan tajam pada 2021 menjadi 12.328,48 ton, dan kembali menurun hingga 10.896,60 ton pada 2022. Tren penurunan pada periode 2020–2022 ini dapat dikaitkan dengan pengaruh kondisi oseanografis dan pola musim barat (Desember–Maret) yang ditandai dengan gelombang tinggi, curah hujan ekstrem, serta aktivitas monsun barat laut, yang membatasi operasi kapal penangkap ikan di wilayah perairan selatan Jawa, termasuk PPN Prigi.

Memasuki tahun 2023, produksi mulai meningkat signifikan menjadi 15.406,74 ton, sejalan dengan stabilitas cuaca dan peningkatan produktivitas perairan selama musim timur (Juni–September). Pada musim ini, fenomena *upwelling* atau naiknya massa air kaya nutrisi dari lapisan bawah ke permukaan laut terjadi secara intens di perairan selatan Jawa. Kondisi ini meningkatkan ketersediaan fitoplankton dan zooplankton sebagai sumber makanan ikan pelagis seperti cakalang, tongkol, dan



tuna, sehingga volume tangkapan meningkat. Puncak produksi berikutnya terjadi pada 2024 sebesar 17.355,19 ton, yang mengindikasikan periode laut yang produktif dan stabil secara oseanografis.

Namun, pada 2025 produksi kembali menurun menjadi 10.616,51 ton, kemungkinan akibat anomali iklim seperti El Niño moderat hingga kuat, yang sering menyebabkan penurunan produktivitas perairan akibat berkurangnya intensitas upwelling dan meningkatnya suhu permukaan laut (SPL). Secara keseluruhan, fluktuasi volume produksi perikanan tangkap di PPN Prigi sangat dipengaruhi oleh pola musiman (barat dan timur) serta dinamika oseanografis, di mana musim timur cenderung mendukung peningkatan hasil tangkapan, sedangkan musim barat dan fenomena iklim ekstrem berpotensi menurunkannya.

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian volume produksi perikanan tangkap triwulan III 2025 sebesar 62,25%. Sedangkan dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebesar 178,47%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator kinerja “Volume Produksi Perikanan Tangkap” pada triwulan II 2025 yaitu adanya upaya pendataan volume produksi perikanan tangkap dengan sistem *shift* 24 jam untuk meminimalisir terjadinya *data unrecorded* / *data loosing*, serta dilaksanakannya penghitungan dan analisis data potensi perikanan tangkap.

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja “Volume Produksi Perikanan Tangkap” pada triwulan II 2025 antara lain:

- Adanya penurunan jumlah armada kapal perikanan sebanyak 21 unit (3,47%). Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, jumlah armada menunjukkan tren menurun. Selain itu, pada tahun 2025 merupakan jumlah armada paling sedikit. Hal ini disebabkan oleh penurunan produktivitas kapal, penurunan kelayakan usaha, dan berpindah pelabuhan pangkalan mendekati daerah penangkapan;
- Faktor oseanografi yang tidak mendukung upaya penangkapan seperti curah hujan tinggi, gelombang tinggi, dan kecepatan angin tinggi. Upaya penangkapan bersifat fluktuatif, tinggi rendahnya upaya penangkapan

dipengaruhi oleh kondisi sumber daya ikan secara keseluruhan untuk meminimalisir risiko kerugian operasional penangkapan;

- Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi penurunan frekuensi kunjungan kapal pada alat tangkap dominan sebanyak 1.097 kali (9,44%) serta penurunan persentase *successed trip* sebesar 6,57%;
- Pendaratan hasil tangkapan dilakukan pada beberapa titik dengan jumlah enumerator yang terbatas. Sedangkan, sarana pendukung (CCTV) di beberapa titik mengalami kerusakan.

Upaya yang akan dilaksanakan yaitu monitoring dan evaluasi terkait sistem pendataan produksi perikanan tangkap, validasi data hasil tangkapan ikan, dan perbaikan sarana pendukung (CCTV), serta mengajukan permohonan revisi target indikator kinerja. Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan yaitu validasi data internal terkait kesesuaian hasil tangkapan dengan alat tangkap yang digunakan, serta pengelohan dan validasi data statistik perikanan tangkap dan validasi satu data.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Tidak ada dukungan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja ini. Dalam pencapaian indikator kinerja ini, didukung oleh 13 (tiga belas) orang SDM yang terdiri dari 8 (delapan) orang enumerator, 3 (tiga) orang pengolah data, dan 2 (dua) orang validator. Penggunaan excel terformat yang terintegrasi dengan *dashboard* Operasional dan Sistem Informasi Capaian Kinerja Pelabuhan Perikanan (SiCakep) mendukung efisiensi SDM dalam pengolahan data produksi perikanan tangkap.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian IK 2 yaitu program layanan data dan informasi dengan kegiatan penyelenggaraan, pengolahan, dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

3.2.3. Sasaran Kegiatan (SK) 3 – Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggungjawab

Indikator Kinerja (IK) pada SK 3 yaitu Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat

Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara prigi; dan Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Indikator Kinerja (IK) 3 – Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dihitung berdasarkan jumlah usulan pengusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dibandingkan dengan total jumlah usulan pengusahaan yang masuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Pengukuran capaian indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga belum dilakukan pengukuran dan membandingkan capaian pada triwulan III 2025.

Indikator Kinerja (IK) 4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Tingkat kinerja pelabuhan perikanan merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Ditjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas Surat Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 432/DJPT.3/OT.220.D3/I/2018). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi: 1) Administrasi dan sistem informasi; 2) Fasilitas pelabuhan perikanan; 3) Pelayanan umum; serta 4) Investasi dan industri.

Tabel 7. Capaian IK "Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan III 2025

SK 3		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab							
IK 4		Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi							
Realisasi Tahun 2020 – 2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra	
TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	TW III Tahun 2024	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra	% terhadap Target Renstra
80,50	87,75	93,00	93,33	96,25	84	97,75	116,37%	84	116,37%

Rata-rata nilai tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada triwulan III 2025 yaitu 97,75 atau 116,37% dari target triwulan III 2025. Capaian nilai

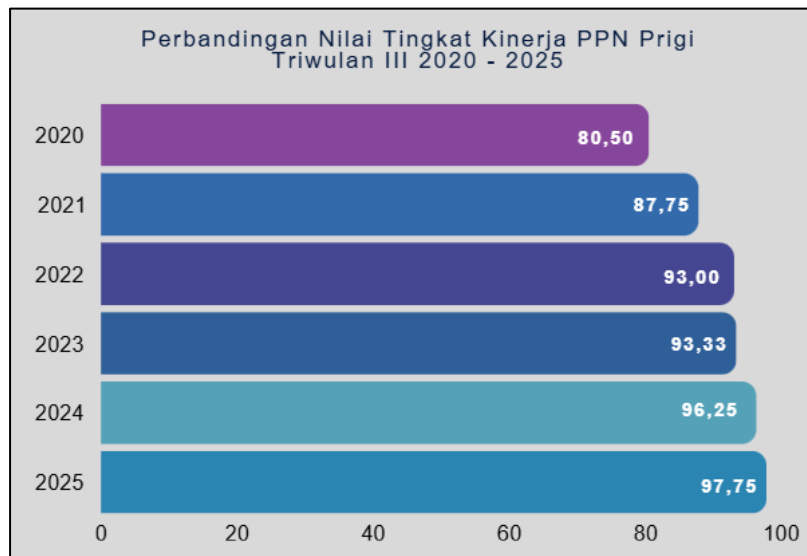
tingkat kinerja bersifat fluktuatif yang sangat dipengaruhi oleh 27 (dua puluh tujuh) kriteria penilaian. Capaian tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi per bulan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 8. Rekapitulasi Nilai Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2025

No	Bulan	Nilai Tingkat Kinerja PP. Prigi		Rata-Rata Triwulan
		Bulan	Kategori	
1	Januari	96,00	Sangat Baik	94,58
2	Februari	93,75	Sangat Baik	
3	Maret	94,00	Sangat Baik	
4	April	94,25	Sangat Baik	94,08
5	Mei	95,00	Sangat Baik	
6	Juni	93,00	Sangat Baik	
7	Juli	95,25	Sangat Baik	97,75
8	Agustus	99,00	Sangat Baik	
9	September	99,00	Sangat Baik	

Berdasarkan tabel *Rekapitulasi Nilai Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi Tahun 2025*, terlihat bahwa nilai rata-rata kinerja pelabuhan menunjukkan tren peningkatan dari triwulan I hingga triwulan III. Pada Triwulan I, rata-rata nilai kinerja sebesar 94,58, kemudian sedikit menurun pada Triwulan II menjadi 94,08, dan meningkat signifikan pada Triwulan III mencapai 97,75. Peningkatan pada triwulan III menunjukkan adanya optimalisasi operasional pelabuhan selama periode puncak aktivitas perikanan tangkap, yang umumnya terjadi pada musim timur (Juli–September) ketika kondisi oseanografis lebih stabil dan hasil tangkapan meningkat. Hal ini mencerminkan peningkatan efisiensi pelayanan, pengelolaan hasil tangkapan, serta koordinasi antar tim kerja di PPN Prigi, yang berdampak positif terhadap capaian kinerja pelabuhan secara keseluruhan.

Berdasarkan Tabel 8, kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten. Meskipun terjadi sedikit penurunan, hal tersebut tidak mempengaruhi keseluruhan kategori kinerja yang tetap berada pada kriteria “Sangat Baik”. Konsistensi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan operasional seperti kondisi cuaca yang kurang mendukung, pengelolaan pelabuhan tetap berjalan secara optimal.



Gambar 8. Perbandingan Capaian Tingkat Kinerja Triwulan III 2020 – 2025

Grafik *Perbandingan Nilai Tingkat Kinerja PPN Prigi Triwulan III Tahun 2020–2025* menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang konsisten dan signifikan selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai kinerja tercatat sebesar 80,50, kategori “baik”, kemudian terus meningkat setiap tahun hingga mencapai 97,75 pada tahun 2025 dengan kategori “sangat baik”. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pelabuhan, baik dari sisi pelayanan, efisiensi operasional, maupun dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia. Selain itu, peningkatan hasil tangkapan ikan selama musim timur (Juli–September) juga berkontribusi terhadap tingginya nilai kinerja pelabuhan, karena volume aktivitas bongkar muat dan pelayanan meningkat signifikan.

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian triwulan II 2025 sebesar 116,37%. Sedangkan dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu) dengan nilai tingkat kinerja pelabuhan sebesar 98,80 (Sangat Baik), capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebesar 98,94%. Kriteria yang memiliki capaian yang lebih rendah yaitu perubahan jumlah investor.

Faktor pendukung tercapainya target indikator tingkat kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” yaitu:

- Adanya kontribusi dan komitmen dari setiap kelompok kerja yang melakukan tugasnya serta melaporkan dan menginput data pada sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP);
- Adanya monitoring dan evaluasi serta validasi dan supervisi secara berkala terhadap input data serta capaian evaluasi kinerja pada aplikasi PIPP;
- Adanya tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi hasil monitoring evaluasi dan supervisi pelaksanaan input data PIPP.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian target ini yaitu tingkat ketelitian operator dalam penginputan data perlu ditingkatkan (*human error*), pemenuhan 27 (dua puluh tujuh) parameter penilaian, keterbatasan anggaran dalam rangka *maintenance* sarana prasarana, jaringan internet kurang cepat, adanya perubahan sistem input data harian/real time dan *system error* yang menyebabkan data tidak terekam.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu menyusun jadwal pelaksanaan input data sehingga dapat meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta validasi terdapat input data yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan III 2025 antara lain pelaksanaan operasional PIPP di pelabuhan perikanan, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta validasi terhadap pelaksanaan input data.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Pencapaian IK 4 didukung oleh anggaran sebesar Rp 26.996.000,00 dan sampai dengan triwulan III 2025, realisasi anggaran Rp 8.726.000,00 atau 32,32%. Dalam pencapaian IK 4, didukung oleh 12 (dua belas) orang operator Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan. Penggunaan dashboard Operasional Pelabuhan PPN Prigi mendukung efisiensi waktu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan input data PIPP.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Pelabuhan yaitu pelabuhan perikanan UPT pusat dan perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar melalui

kegiatan pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu dan pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Tingkat pelayanan kesyahbandaran merupakan indikator yang menunjukkan pelayanan kesyahbandaran yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen, yaitu:

- 1) Jumlah Persetujuan Berlayar yang diterbitkan (bobot 40%) - Dihitung berdasarkan jumlah kapal yang diterbitkan persetujuan berlayarnya dibagi dengan jumlah kapal aktif;
- 2) Jumlah Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%) - Dihitung berdasarkan kapal yang diterbitkan STBLKK dibandingkan jumlah kapal aktif;
- 3) Jumlah Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan (20%) – Formula penghitungan = $(100 - (\text{jumlah permintaan verifikasi SHTI yang diterbitkan} : \text{jumlah SHTI yang diterbitkan}) \times 100\%)$.

Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan, tetapi tetap dilakukan monitoring dan evaluasi berjalan. Hingga triwulan III realisasi telah mencapai 41,12% dari target 46% atau 89,39% dari target tahun 2025. Kondisi tersebut dengan sisa periode berjalan akan dilakukan upaya percepatan dan perbaikan pelayanan dalam rangka untuk mengakselerasi peningkatan kinerja.

Indikator Kinerja (IK) 6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah

beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya. Indikator kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” dihitung berdasarkan persentase pengembangan fasilitas dibandingkan dengan *masterplan / draft* perubahan *masterplan*.

Indikator Kinerja ini bersifat tahunan, sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian dan belum dapat membandingkan dengan target tahunan, capaian tahun sebelumnya, target Renstra, dan capaian Satker lain.

Indikator Kinerja (IK) 7 – Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus 1) bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perikanan dan lingkungan.

Penilaian pengendalian lingkungan pelabuhan perikanan berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang diperbarui berkala dan dicantumkan dalam bentuk score pelabuhan. Indikator hasil meliputi kebersihan pelabuhan, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3, dan kepatuhan regulasi.

Tabel 9. Capaian IK "Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan III 2025

SK 3		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab							
IK 7		Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi							
Realisasi Tahun 2020 – 2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra	
TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	TW III Tahun 2024	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra	% terhadap Target Renstra
80,58	87,75	93,00	93,33	96,25	30,10	94,37	313,52%	30,10	313,52%



Capaian IK “Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” triwulan III 2025 sebesar 94,37 atau 313,52% dari target triwulan III 2025. Capaian nilai pengendalian lingkungan PPN Prigi memiliki predikat “Sangat Baik“, hal ini disebabkan seluruh indikator program *mandatory* dan program *voluntary* tata kelola pengendalian lingkungan dipenuhi dan dilaksanakan.

Berdasarkan Tabel 10 Capaian IK “Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Triwulan III Tahun 2025, terlihat bahwa pengelolaan lingkungan di PPN Prigi menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Nilai pengendalian lingkungan meningkat dari 80,58 pada tahun 2020 menjadi 96,25 pada tahun 2024, dan mencapai 94,37 pada tahun 2025. Capaian tersebut jauh melampaui target tahun 2025 sebesar 30,10, dengan tingkat realisasi mencapai 313,52% terhadap target, serta 313,52% terhadap target Renstra (Rencana Strategis). Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengendalian lingkungan di PPN Prigi tidak hanya efektif, tetapi juga jauh melebihi standar kinerja yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2024), capaian triwulan III 2025 mengalami penurunan sebesar 1,88 (1,95%). Hal ini disebabkan, pada tahun 2025, terdapat perubahan penilaian pada beberapa indikator program / hasil *mandatory* dan *voluntary*. Selain itu, adanya efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan program tidak dapat dilaksanakan.

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian triwulan III 2025 sebesar 313,52%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 106,71% dimana nilai SELARASKAN PPN Palabuhanratu sebesar 88,44.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja nilai pengendalian lingkungan pada triwulan III 2025 yaitu:

- 1) Adanya kontribusi dan komitmen dari setiap kelompok kerja yang melakukan tugasnya serta melaporkan dan mengumpulkan *evidence* pelaksanaan kegiatan melalui WAG Selaraskan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;

- 
- 2) Data dukung yang dibutuhkan dalam pelaporan setiap program *mandatory* dan *voluntary* di SELARASKAN sudah terpenuhi sesuai dengan periode pelaksanaan masing-masing program;
 - 3) Adanya monitoring dan evaluasi serta validasi dan supervisi secara berkala terhadap input data yang telah dilaksanakan.

Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya efisiensi anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan program selaraskan yang tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, capaian masing-masing indikator penilaian bersifat fluktuatif.

Upaya yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya antara lain memonitoring dan mengevaluasi secara berkala terhadap input data yang telah dilaksanakan, sehingga diharapkan dapat mengontrol capaian indikator-indikator penilaian yang dapat dikendalikan. Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan pada periode triwulan III 2025 yaitu implementasi K5 serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian lingkungan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumberdaya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Anggaran untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini sebesar Rp 24.138.000,00. Sampai dengan triwulan III 2025, telah terealisasi sebesar Rp 23.241.895,00 atau 96,29%. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 8 (delapan) orang SDM berdasarkan Surat Tugas Tim Pengelola Aplikasi Selaraskan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Pemantauan dan pengumpulan *evidence* kegiatan *voluntary* dan *mandatory* disampaikan melalui WAG Selaraskan, sehingga memudahkan koordinasi antara petugas pelaksana dengan petugas input data pada aplikasi.

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan indikator kinerja ini yaitu program pelabuhan perikanan UPT pusat dan perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar melalui kegiatan K5 di pelabuhan perikanan, gerakan cinta laut dalam rangka mendukung pengendalian lingkungan, pemantauan pengelolaan lingkungan, dan *surveillance* ISO 14001:2015.

3.2.4. Sasaran Kegiatan (SK) 4 – Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator Kinerja (IK) pada SK 4 yaitu Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan dan Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 8 – Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Kinerja (IK) “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Tabel 10. Capaian IK “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan III 2025

SK 4		Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi							
IK 7		Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)							
Realisasi Tahun 2020 – 2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra	
TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	TW III Tahun 2024	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra	% terhadap Target Renstra
-	-	-	308	433	494	535	108,30%	502	106,57%

Capaian indikator kinerja triwulan III 2025 sebanyak 535 dokumen dari target 494 dokumen atau 108,30% dari target yang ditetapkan. Sesuai dengan formula penghitungan pada manual IKU, capaian pada triwulan III 2025 merupakan akumulasi dari capaian tahun 2023 (337 kapal), 2024 (149 kapal), dan tahun 2025 (49 kapal).

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi melayani penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dan pelabuhan binaan (UPT PPP Tamperan, UPT PPP Popoh, IPPP Tambakrejo, UPT PPP Pondokdadap, UPT PPP Muncar, dan Pelabuhan Masami / Tanjungwangi).

Tabel 11. Rekapitulasi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

No	Bulan	Jumlah Penerbitan Dokumen				Jumlah
		2023	2024	2025		
				Reguler	Pembaruan	
1	Januari	33	10	2	-	45
2	Februari	40	6	-	1	47
3	Maret	59	7	2	1	69
4	April	32	-	13	4	49
5	Mei	51	2	9	3	65
6	Juni	26	14	6	-	46
7	Juli	40	16	5	-	61
8	Agustus	2	16	2	-	20
9	September	25	29	1	-	55
10	Oktober	19	14			33
11	November	4	17			21
12	Desember	6	18			24
		337	149	40	9	535

Jika dibandingkan dengan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian penerbitan SKKP menunjukkan tren menurun. Hal ini sebabkan oleh adanya perbedaan mekanisme penerbitan SKKP pada tahun 2023 menggunakan mekanisme surat edaran dan reguler. Pada tahun 2024 hanya menggunakan mekanisme reguler. Sedangkan pada tahun 2025, selain hanya menggunakan mekanisme reguler, juga terdapat efisiensi anggaran.

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian indikator kinerja ini pada triwulan III 2025 sebesar 108,30%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian satker lain (Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu), capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebesar 215,73%, dimana capaian PPN Palabuhanratu sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) dokumen.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu adanya penambahan SDM petugas pemeriksa kelaikan kapal dimana beberapa merupakan PNS BKO, diharapkan bisa mempercepat proses pemeriksaan kelaikan kapal perikanan. Sedangkan faktor penghambat / kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu kurangnya kesadaran dan/atau kepatuhan pelaku usaha dalam melengkapi aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan, sehingga menghambat proses pemeriksanaan dan penerbitan SKKP. Selain itu, kegiatan pengawasan belum maksimal. Hal ini disebabkan masih terkendala jumlah SDM pengawasan tidak sebanding dengan luas wilayah kerja pengawan.



Upaya yang akan dilaksanakan antara lain melaksanakan pembinaan / sosialisasi secara perorangan kepada pemilik kapal terkait komponen kelaikan kapal perikanan, serta pentingnya legalitas dan kewajiban dokumen. Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan antara lain pemeriksaan kelaikan kapal, sosialisasi kelaikan kapal perikanan kepada pemilik kapal perikanan secara perorangan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran akan dilakukan pengukuran pada akhir tahun anggaran. Dalam pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 9 (sembilan) orang SDM yang terdiri atas 7 (tujuh) orang petugas kelaikan kapal, 1 (satu) orang verifikator, dan Kepala Pelabuhan.

Indikator Kinerja (IK) 9 – Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Indikator Kinerja (IK) “Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan” merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B. 2541/MEN-KP/XII/2024. Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat semester, sehingga pada triwulan III tidak dilakukan pengukuran.

Akan tetapi, berdasarkan hasil pengumpulan dan verifikasi dokumen Persetujuan Berlayar (PB) sampai dengan semester I 2025, capaian indikator kinerja tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sebesar 0,37% atau 142,31% dari target yang ditentukan.

Capaian tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berada pada range nilai $> 0,25$ s.d. $< 0,50$ kategori “Cukup”. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan, seluruh dokumen SPB yang diterbitkan telah memenuhi persyaratan penerbitan minimal. Akan tetapi, sebagian besar kapal yang beroperasi

belum memasang *Vessel Monitoring System* (VMS) dan belum memiliki Perjanjian Kerja Laut (PKL) serta BPJS.

Persyaratan penerbitan SPB berdasarkan minimal syarat penerbitan meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pas Kapal, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP), Sertifikasi (SKK, BST, ANKAPIN), Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLK), dan *Crew List*. Sedangkan berdasarkan Surat Edaran, terdapat tambahan persyaratan dokumen Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT), BPJS, dan Perjanjian Kerja Laut (PKL).

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran akan dilakukan pengukuran pada akhir tahun anggaran. Dalam pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 5 (lima) orang SDM yang terdiri dari petugas teknis, tenaga pendukung, dan staf pelaksana lapangan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja tingkat pemenuhan persyaratan berkerja awak kapal perikanan yaitu fasilitasi dan pembinaan masyarakat melalui kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi awak kapal perikanan / nelayan.

3.2.5. Sasaran Kegiatan (SK) 5 – Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kegiatan (SK) 5 sebagai berikut :

1. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
3. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
4. Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
5. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;

- 
6. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 9. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Indikator Kinerja (IK) 10 – Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/ wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator kinerja Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan penilaian pembangunan ZI menuju WBK yang mencakup 6 (enam) area pengungkit dan 2 (dua) area komponen hasil yang mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga sampai dengan triwulan III tahun 2025 belum dapat dilakukan analisis dan evaluasi.

Indikator Kinerja (IK) 11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada audit, reviu, dan evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV 2024 s.d. triwulan III 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/ atau tuntas) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Formula penghitungan yaitu persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diberikan.

Tabel 12. Capaian IK "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan III 2025

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi							
IK 11		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Kapal)							
Realisasi Tahun 2020 – 2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra	
TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	TW III Tahun 2024	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra	% terhadap Target Renstra
-	-	-	100	100	85	100	125,00%	85	125,00%

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada triwulan III 2025 yaitu 100% atau 125% dari target triwulan III 2025. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian triwulan III 2025 memiliki nilai yang sama. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian indikator kinerja ini sebesar 125%.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu adanya tindak lanjut seluruh temuan dan/atau saran pada Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan tepat waktu. Secara umum, tidak terdapat kendala dalam pencapaian target indikator kinerja ini.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini sebesar Rp 16.637.000,00. Realisasi penyerapan anggaran sampai triwulan III 2025 sebesar Rp 13.910.000,00 atau 83,61%. Kegiatan koordinasi dan konsultasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dilakukan secara *online* dan pemenuhan dokumen diunggah pada *google drive* sehingga lebih efektif dan efisien, baik dari segi sumber daya manusia maupun waktu penyelesaiannya.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu layanan manajemen keuangan melalui kegiatan penyelesaian dan evaluasi tindak lanjut LHA di bidang keuangan dan perbendaharaan.

Indikator Kinerja (IK) 12 – Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dihitung berdasarkan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian didalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga sampai dengan triwulan III tahun 2025 belum dapat dilakukan analisis dan evaluasi. Pada tahun 2025, terdapat penambahan anggota tim pengelola kinerja lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, sehingga diperlukan upaya peningkatan pengetahuan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Indikator Kinerja (IK) 13 – Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Terdapat penyesuaian / perubahan cara perhitungan IP ASN sesuai dengan surat BKN 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 15 September 2023 tentang pengukuran IP-ASN. Perubahan formula penghitungan sebagai berikut:

- Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
- Diklat 20 JP dihitung secara proporsioanl;
- Penghitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja;
- Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.



Pengukuran indikator kinerja ini bersifat semester, sehingga pada triwulan III belum dilakukan pengukuran. Akan tetapi, terus dilakukan pemantauan terhadap pencapaiannya. Sampai dengan triwulan III tahun 2025, capaian IP ASN sebesar 90 (SANGAT BAIK). Peningkatan capaian ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ASN, baik melalui pengembangan kapasitas, sistem penilaian kinerja, maupun kebijakan pendukung lainnya. Lonjakan tajam pada tahun 2025 mengindikasikan adanya langkah strategis atau intervensi besar yang berhasil mendorong capaian IP secara signifikan.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu terbitnya aturan BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran IP ASN yang berdampak pada peningkatan jumlah pegawai yang terhitung dalam capaian IP ASN, adanya monitoring dan evaluasi capaian IP ASN secara berkala, penerbitan memorandum untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, serta adanya partisipasi dari seluruh ASN lingkup PPN Prigi. Sedangkan faktor penghambat tercapainya indikator kinerja ini antara lain: hasil penilaian kinerja pegawai dengan kategori BUTUH PERBAIKAN.

Berdasarkan faktor penghambat yang dihadapi, upaya yang akan dilaksanakan yaitu melakukan evaluasi mandiri terhadap pegawai-pegawai yang memiliki capaian yang maksimal pada setiap dimensi penilaian.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumberdaya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh anggaran sebesar Rp 7.974.843.000,00. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp 6.550.463.711,00 atau 82,14%. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran akan dihitung pada akhir tahun. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh seluruh ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Selain itu, didukung oleh 2 (dua) orang Analis Kepegawaian yang bertugas melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan, monitoring dan evaluasi, serta input data capaian pengembangan kompetensi pegawai. Pemantauan pelatihan pegawai didukung oleh aplikasi Mentari (Media Pelaporan kegiatan Pegawai Prigi) sehingga membantu efektivitas dan efisiensi dalam pelaporan dan pemantauan IP ASN.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja ini yaitu program dukungan manajemen SDM melalui kegiatan layanan perkantoran, penguatan integritas dan substansi teknis bagi PNS, dan peningkatan kompetensi pegawai.

Indikator Kinerja (IK) 14 – Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dapat mempresentasikan kualitas perencanaan PBJ di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Nilai pada indikator ini diperoleh didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan pada SiRUP dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaaaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Tabel 13. Capaian IK "Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan III 2025

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi							
IK 14		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra	
TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	TW III Tahun 2024	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra	% terhadap Target Renstra
-	-	-	-	-	76	100	131,58%	76	131,58%

Pada triwulan III 2025 telah dilaksanakannya upaya optimalisasi kinerja Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan tindak lanjut berupa identifikasi belanja pengadaan (PBJ) yang terdampak efisiensi belanja dan dapat dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada SiRUP.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi telah melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SiRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga, diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SiRUP yang melebihi 100%.

Pada triwulan III 2025, persentase RUP terumumkan sebesar 100% artinya tidak terdapat selisih antara besaran pagu yang harus diumumkan sesuai dengan kertas kerja klarifikasi dengan pagu yang terumumkan pada SiRUP.

Tabel 14. Hasil Penghitungan Persentase Rencana Umum Pengadaan Terumumkan di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan III 2025

Kertas Kerja Klarifikasi (File Excel)			Rekap RUP Terumumkan (Aplikasi SiRUP)		
RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih Kertas Kerja – SiRUP	Pagu Terumumkan	%
2.103.286.000	2.103.286.000	2.103.286.000	0	2.103.286.000	100

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu adanya upaya konsultasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga RUP yang terumumkan dalam SiRUP sesuai dengan RUP pada kertas kerja klarifikasi. Secara umum, tidak terdapat kendala dalam pencapaian target indikator kinerja ini.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Anggaran untuk



mendukung pencapaian indikator kinerja ini sebesar Rp 10.773.101.000,00. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III 2025 sebesar Rp 8.605.888.639,00 atau 79,88%. SDM yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat Pembuat Komitmen (PKK).

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu layanan perkantoran.

Indikator Kinerja (IK) 15 – Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Persentase pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat pengelolaan BMN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%);
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%);
- 3) Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- 4) Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (bobot 25%)
- 5) Penyusunan / penyampaian Laporan BMN (Semester dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga sampai dengan triwulan III tahun 2025 belum dapat dilakukan analisis dan evaluasi.

Indikator Kinerja (IK) 16 – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara / Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan

kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Peraturan DJPB PER-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Halaman 3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retus SP2D; 12) Pagu Minus; 13) Dispensasi.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) memiliki pengukuran bersifat semester. Akan tetapi tetap dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaiannya. Nilai IKPA pada triwulan III sebesar 100. Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja Nilai IKPA pada semester I 2025 sebagai berikut:

- 1) Perencanaan anggaran yang matang
Penyusunan RKA-K/L atau DIPA yang realistis dan terukur, berdasarkan kebutuhan riil setiap unit kerja dan proyeksi kinerja.
- 2) Pelaksanaan tepat waktu
Pengajuan revisi DIPA, SP2D, dan penatausahaan anggaran dilakukan sesuai jadwal, sehingga tidak menimbulkan tunggakan atau deviasi.
- 3) Sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan
Adanya *dashboard* atau aplikasi pelaporan realisasi anggaran harian/mingguan, serta rapat evaluasi berkala untuk mendeteksi dan menindaklanjuti penyimpangan sejak dini.
- 4) Koordinasi antar unit kerja
Sinergi yang baik antara unit perencanaan, keuangan, teknis pelaksana, dan tim pengawasan (inspektorat/internal audit) untuk memastikan kesesuaian antara program, anggaran, dan laporan.
- 5) Kepatuhan terhadap regulasi
Penerapan prosedur SP2D, LPJ dan pelaporan keuangan sesuai peraturan (PMK, Perpres, SE DJPb), sehingga tidak ada temuan administrasi yang merugikan.

Upaya yang akan dilaksanakan yaitu melakukan pemantauan dan rapat evaluasi realisasi anggaran secara berkala untuk mendeteksi dan menindaklanjuti



penyimpangan sejak dini dan melaksanakan akselerasi pelaksanaan pertanggungjawaban tepat waktu. Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan yaitu evaluasi berkelanjutan terhadap serapan anggaran dan melaksanakan koordinasi antar unit kerja.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini sebesar Rp 16.637.000,00. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III 2025 sebesar Rp 13.910.368,00 atau 83,61%. SDM yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari 2 (dua) orang Pengelola Keuangan, 2 (dua) orang Pranata Keuangan APBN, serta 1 (satu) orang Analis Pengelola Keuangan APBN dan 1 orang Pengelola BMN. Pemanfaatan SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi) dan aplikasi *e-Budgeting / e-Monitoring* yang memudahkan input data, validasi, dan pelaporan *real time*.

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu program layanan dukungan manajemen keuangan - pelaporan keuangan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui kegiatan laporan keuangan dan BMN.

Indikator Kinerja (IK) 17 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara / Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat

tahunan, sehingga sampai dengan triwulan III tahun 2025 belum dapat dilakukan analisis dan evaluasi.

Indikator Kinerja (IK) 18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Nilai SKM diukur dengan melihat hasil penghitungan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/ Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/ Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil penghitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan III 2025

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi							
IK 18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra	
TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	TW III Tahun 2024	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra	% terhadap Target Renstra
82	84	86	89,04	92,84	88,5	92,87	104,94%	88,5	104,94%

Capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat triwulan III 2025 sebesar 92,87 dengan kategori “Sangat Baik” atau 104,94% dari target triwulan III 2025. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara periodik. Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Berdasarkan hasil analisis Indeks Kepuasan Masyarakat triwulan III 2025, unsur dengan nilai tertinggi yaitu:

- Kemudahan Prosedur

Dalam melaksanakan pelayanan, PPN Prigi telah menetapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penetapan SP dan SOP tersebut memuat semua prosedur dalam pelaksanaan pelayanan sehingga memudahkan pengguna jasa dalam memahami pelaksanaan pelayanan. Untuk pelayanan dengan nilai tertinggi unsur kemudahan prosedur adalah pelayanan penggunaan gedung beku, pelayanan sertifikat hasil tangkapan ikan dan sertifikat kelaikan kapal perikanan.

- Kesesuaian Produk

Dalam melaksanakan pelayanan, PPN Prigi telah menetapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelayanan yang dilaksanakan petugas pelayanan tersebut sudah sesuai Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga produk pelayanan yang dihasilkan sudah sesuai. Untuk pelayanan dengan nilai tertinggi unsur kesesuaian produk adalah pelayanan penggunaan gedung beku, pelayanan sertifikat hasil tangkapan ikan dan sertifikat kelaikan kapal perikanan.

- Kemampuan Fitur / Kemampuan Petugas

Kompetensi petugas merupakan salah satu unsur dengan nilai terendah pada Survey Kepuasan Masyarakat triwulan 2 tahun 2025. Dengan adanya tindak lanjut berupa Bimtek Pelayanan Prima, pada Survey Kepuasan Masyarakat triwulan 3 ini terjadi peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat pada unsur kemudahan fitur/kemampuan petugas. Untuk pelayanan dengan nilai tertinggi unsur kemudahan fitur/kemampuan petugas adalah pelayanan penggunaan gedung beku, pelayanan sertifikat hasil tangkapan ikan dan sertifikat kelaikan kapal perikanan.

Sedangkan unsur layanan dengan nilai terendah berdasarkan hasil analisis indeks survei kepuasan masyarakat adalah:

- Kesesuaian Biaya

Dari hasil analisa, unsur kesesuaian biaya yang mendapatkan nilai rendah adalah pelayanan tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan, kemudian disusul pelayanan persetujuan berlayar dan pelayanan penggunaan tanah

dan/atau bangunan. Nilai tersebut rendah dimungkinkan kurangnya sosialisasi terkait tarif pelayanan.

- Layanan Konsultasi

Layanan konsultasi termasuk dalam unsur terendah pada penilaian Survey Kepuasan Masyarakat triwulan 3 tahun 2025. Adapun pelayanan dengan nilai unsur layanan konsultasi terendah adalah pelayanan tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan, kemudian disusul pelayanan penggunaan tanah dan/atau bangunan dan pelayanan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan. Hal tersebut dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi terhadap sarana layanan konsultasi yang ada di PPN Prigi.

- Kecepatan Respon

Pelayanan dengan nilai unsur kecepatan respon terendah yaitu pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal, pelayanan tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan, kemudian disusul pelayanan penggunaan tanah dan/atau bangunan. Hal tersebut dimungkinkan karena petugas pelayanan kurang responsif dalam melaksanakan pelayanan.

Perbandingan capaian nilai SKM triwulan III tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 9. Perbandingan Nilai SKM Triwulan III Tahun 2020 – 2025

Grafik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten pada nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) PPN Prigi dari Triwulan III tahun 2020 hingga 2025.



Pada tahun 2020, nilai SKM tercatat sebesar 82, kemudian meningkat stabil setiap tahunnya menjadi 84 (2021), 86 (2022), dan 89,04 (2023). Peningkatan signifikan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas layanan publik. Pada tahun 2024 dan 2025, nilai SKM mencapai 92,84 dan 92,87, menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi dan stabil di atas 90. Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan keberhasilan PPN Prigi dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selama lima tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian indikator kinerja Nilai SKM triwulan III 2024 sebesar 104,94%. Berdasarkan hasil penyelenggaraan SKM Triwulan III tahun 2025, PPN Prigi memperoleh nilai SKM sebesar 92,87, sedangkan PPN Palabuhanratu mencapai 95,43. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan PPN Palabuhanratu sedikit lebih tinggi dibandingkan PPN Prigi, dengan selisih sekitar 2,56 poin. PPN Palabuhanratu menonjol dalam hampir semua unsur pelayanan (U1–U9), terutama pada aspek *tangible* dan *reliability* yang konsisten tinggi. Sementara itu, PPN Prigi tetap menunjukkan kinerja pelayanan yang sangat baik dengan nilai di atas 90, menandakan bahwa kedua pelabuhan telah berhasil mempertahankan standar mutu layanan publik yang tinggi dalam lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain adanya perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas pelayanan masyarakat, adanya tindak lanjut monev SKM serta masukan dan/atau saran dari pengguna jasa. Sedangkan faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu petugas pelayanan dinilai kurang cepat dalam memberikan respon serta terdapat beberapa sarana dan prasarana yang rusak.

Upaya yang telah dilaksanakan pada triwulan III yaitu antara lain monitoring dan evaluasi hasil survei kepuasan masyarakat serta menindaklanjuti saran dan/atau masukan serta rekomendasi tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan, serta melaksanakan bimbingan teknis pelayanan prima. Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu melaksanakan pembinaan melalui apel pagi untuk meningkatkan pengetahuan petugas pelayanan publik tentang pelayanan prima.



Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh anggaran sebesar Rp 1.550.000,00. Sampai dengan triwulan III 2025 serapan anggaran mencapai Rp 1.465.000,00 atau 94,52%. Berdasarkan Surat Tugas Nomor B.144/PPN.PRG/KP.440/I/2025 tentang Petugas Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, SDM yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Penggunaan aplikasi SISUSAN meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan SKM, baik dari segi waktu maupun SDM.

Program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator kinerja ini yaitu program reformasi birokrasi melalui kegiatan koordinasi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Nomor T.A. 2025 dengan nomor: SP DIPA 032.03.2.427670/2025 tanggal 02 Desember 2024 adalah Rp 13.527.573.000,00 (Pagu sebelum blokir). Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang upaya efisiensi anggaran pada APBN tahun 2025, berpengaruh terhadap jumlah anggaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang berubah menjadi Rp 11.039.056.000,00 (Pagu setelah blokir). Anggaran tersebut dibagi dalam 3 (tiga) kegiatan utama sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
- 2) Pengelolaan Sumber Daya Ikan
- 3) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan II 2025 sebesar Rp 8.822.032.556,00 atau sebesar 79,92% dari total Pagu Anggaran T.A. 2025.

Tabel 16. Realisasi Anggaran berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Utama Triwulan III 2025

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	227.446.000	180.399.543	79,32%
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	1.142.000	1.142.000	100,00%
3	Dukungan Manajemen Internal	10.810.468.000	8.640.491.013	79,93%
Jumlah (Rp)		11.039.056.000	8.822.032.556	79,92%

Target anggaran yang ditetapkan direncanakan untuk menghasilkan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan triwulan III 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 17. Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan Triwulan III 2025

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	113.384.000	112.894.192	79,13
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Meningkat	-	-	-
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab	115.184.000	68.647.351	59,60
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	-	-	-
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10.810.468.000	8.640.491.013	79,93%
Jumlah (Rp)		11.039.056.000	8.822.032.556	79,92%



Bab04

Penutup



BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah direncanakan. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi telah menunjukkan kinerja yang terukur.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan III 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada indikator kinerja selama periode Triwulan III 2025. Terhadap capaian indikator kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi, serta membandingkan dengan target triwulan, tahunan, capaian tahun sebelumnya, target Renstra, dan capaian nasional dan/atau capaian Satker lain yang memiliki karakter hampir sama sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi periode triwulan III 2025 secara keseluruhan dinyatakan tercapai.

Pada triwulan III 2025, Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebesar 114,88% dengan kategori ISTIMEWA. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2025, terdapat 5 (lima) Sasaran Kegiatan dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja. Sedangkan berdasarkan Manual Indikator Kinerja (Manual IKU), menurut sifat pengukuran capainnya, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja bersifat triwulan, 3 (tiga) indikator kinerja bersifat semester, dan 7 (tujuh) indikator kerja bersifat tahun. Pada triwulan III 2025, keseluruhan indikator kinerja dengan pengukuran triwulan sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja tercapai (capaian $\geq 100\%$).

Dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja, terdapat beberapa kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Kondisi oseanografi yang kurang mendukung yang terjadi hampir sepanjang tahun 2025 menyebabkan penurunan produksi yang cukup signifikan, sampai dengan triwulan III 2025 baru mencapai 65% dari target tahun 2025;

- Adanya penurunan nilai pengendalian lingkungan dikarenakan adanya efisiensi anggaran serta capaian masing-masing indikator penilaian yang bersifat fluktuatif;
- Indikator-indikator penilaian IKPA memerlukan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala;
- Petugas pelayanan dinilai kurang cepat dalam memberikan respon.

Hal tersebut menunjukkan perlu upaya yang lebih besar untuk dapat mencapai seluruh target yang ditetapkan pada periode selanjutnya. Upaya-upaya dimaksud disampaikan pada langkah-langkah perbaikan.

4.2. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya

Terdapat 4 (empat) rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (triwulan II 2025). Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti pada periode triwulan III 2025. Adapun rekomendasi periode sebelumnya yaitu:

- Melaksanakan koordinasi dengan tim PIPP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan terkait sistem input dan sistem PIPP;
- Melaksanakan gerai perizinan berusaha sebagai upaya fasilitasi pengajuan dokumen perizinan kapal;
- Melaksanakan kegiatan revisi anggaran (RKAKL) untuk mendukung optimalisasi pencapaian IKU pada periode selanjutnya;
- Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan prima dan pembinaan melalui apel pagi untuk meningkatkan pengetahuan petugas pelayanan publik.

4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi triwulan III 2025, rekomendasi / hal-hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja guna pencapaian target periode selanjutnya sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja serta menganalisis kendala yang dihadapi serta mengajukan permohonan revisi target indikator kinerja Volume Produksi Perikanan Tangkap;

- 
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian nilai pengendalian lingkungan;
 - Melaksanakan pemantauan dan rapat evaluasi untuk mendeteksi dan menindaklanjuti penyimpangan sejak dini;
 - Melaksanakan pembinaan melalui apel pagi untuk meningkatkan pengetahuan petugas pelayanan publik.



Lampiran





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ririn Sugihariyati**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi


Ririn Sugihariyati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.540,58
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	17.054
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	46
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	30,10
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	502
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	76
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	88,50

Data Anggaran :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	802.310.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	10.732.000
3	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.714.531.000
Total Anggaran Tahun 2025		13.527.573.000

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi


Ririn Sugihariyati

TAHUN 2025

[illegible]

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala													
							Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des		
	14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2342.EBD.955.Layanan Manajemen Keuangan (Blokir Efisiensi)	-															
				054.A.Peningkatan kompetensi pegawai (Blokir Efisiensi)	-	1	Kegiatan										1			
				2342.CAN.955. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Blokir Efisiensi)	-	1	Unit													
				051.APengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, (Laptop, Printer, Scanner, Infokus dan Drone) (Blokir Efisiensi)	-	1	Unit				1	1								
				2342.EBA.994.Layanan Perkantoran	10.773.101.000															
				002.B. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai (Blokir Efisiensi)	-	1	Paket								1					
				002.H. Pakaian Dinas Satpam (Blokir Efisiensi)	-	1	Paket								1					
				2342.EBB.951.051.A Peralatan Perkantoran dalam rangka mendukung PNPB Pasca Produksi dan PIT (Blokir Efisiensi)	-	1	Unit				1									
				2342.EBB.951.051.A Layanan Prasarana Internal	9.458.000	1	Unit							1						
	15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	002.A Pemeliharaan Alat Pengolah Data	-	1	Unit											1		
				002.D Perawatan Kendaraan Roda 4/6	109.386.000	7	Unit											1		
				002.E Perawatan Kendaraan Roda 2/3	9.700.000	10	Unit											1		
				002.F Langganan Daya Dan Jasa	756.855.000	1	Layanan											1		
				002.G Jasa Pos / Giro	1.175.000	1	Layanan											1		
				002.H Operasional Perkantoran dan Pimpinan	1.694.750.000	1	Layanan											1		
				002.I Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	77.092.000	1	Kegiatan											1		
				002.J Operasional Perkantoran	149.300.000	1	Layanan											1		
	16	Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2342.EBC.954.055.A. Pelaporan Keuangan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap - Laporan Keuangan dan BMN	16.637.000	1	Kegiatan								1					

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												
							Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
	17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2342.EBD.953.053.A Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran	10.272.000	1	Kegiatan												1
				2342.EBC.954.055.A. Pelaporan Keuangan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	16.637.000	1	Kegiatan												1
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2342.EBA.960.053.A Koordinasi terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1.000.000	1	Kegiatan					1							
				Jumlah	11.039.056.000														

Pagu Awal TA.2025
13.527.573.000

Pagu Blokir TA.2025
2.488.517.000



Terbilang, Januari 2025
Kepala Pelabuhan
Ririn Sugihariyati
NIP. 19671101 199803 2 002



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 KEDIRI
NOMOR KEP-108/KPN.1608/2025



PIAGAM PENGHARGAAN

032.427670-PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI

SEBAGAI SATKER DENGAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN PREDIKAT



TERBAIK

KEDIRI, 25 JULI 2025

KEPALA

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 KEDIRI



Ditandatangani secara elektronik

MOCH. IZMA NUR CHOIRONI





SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Dengan Bangga Diberikan Kepada :

PPN Prigi

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan
periode Juli 2025 dengan kategori :

SANGAT BAIK



DIREKTUR
KEPELAKSIAN PERIKANAN

Dr. Ady Candra, S.Pi, M.Si



SERTIFIKAT PENGHARGAAN



Dengan Bangga Diberikan Kepada :

PPN Prigi

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan
periode Agustus 2025 dengan kategori :

SANGAT BAIK



DIREKTUR
KEPELABUHANAN PERIKANAN

Dr. Ady Candra, S.Pi, M.Si



SERTIFIKAT PENGHARGAAN



Dengan bangga diberikan kepada:

PPN Prigi

**UNTUK HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PELABUHAN
PERIODE SEPTEMBER 2025**
dengan kategori :

SANGAT BAIK

Direktur
Kepelabuhanan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

(Dr. Ady Candra, S.Pi., M.Si)

